

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia sudah pasti menghadapi persaingan dan tantangan yang semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi dapat berasal dari internal yaitu dari pihak manajemen bank itu sendiri. Sedangkan dari eksternal, dapat berasal dari kondisi perekonomian suatu negara tempat bank tersebut beroperasi (Permatasari & Novitasary, 2014). Apalagi sistem perbankan merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan terkait, kegagalan suatu bank tidak hanya menyebabkan masalah pada individual bank tetapi dapat menimbulkan efek domino dalam industri perbankan (Sugeng Haryanto, 2012). Dengan adanya persaingan dan tantangan yang semakin ketat di dunia perbankan maka bank harus dapat menjaga kinerjanya untuk kelangsungan hidup usahanya.

Kinerja keuangan bank merupakan suatu gambaran sampai mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya (Aprianingsih, 2016). Indikator suatu bank memiliki kinerja keuangan yang baik adalah jika mampu mencapai laba yang telah ditargetkan, karena suatu perusahaan umumnya didirikan untuk memperoleh kemampuan laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dan berkembang dengan baik. Biasanya kinerja keuangan diukur dengan indikator profitabilitas, rasio yang bisa dijadikan sebagai indikator profitabilitas suatu bank adalah *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba, semakin tinggi ROA menunjukkan semakin baik kemampuan bank untuk menghasilkan laba dan penggunaan asset bank, serta semakin baik kinerja suatu bank (Mulyasari, Djaelani, & Salim, 2017).

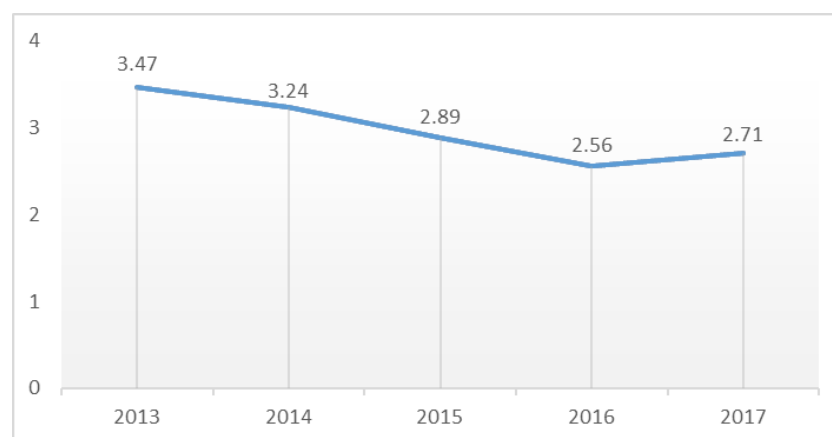
Data berikut merupakan perkembangan tingkat profitabilitas Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) periode 2013-2017 yang dilihat dari sudut ROA (*Return on Asset*):

Tabel 1.1
Data Profitabilitas (ROA) Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN)
Periode 2013-2017

No	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Bank Mandiri	3.66	3.57	3.15	1.95	2.72
2	Bank Negara Indonesia	3.4	3.5	2.6	2.7	2.7
3	Bank Tabungan Negara	1.79	1.14	1.61	1.76	1.71
4	Bank Rakyat Indonesia	5.03	4.73	4.19	3.84	3.69
	RATA-RATA	3.47	3.24	2.89	2.56	2.71

Sumber: Data diolah

Tabel 1.1 diatas dapat digambarkan dengan grafik mengenai perkembangan profitabilitas pada Bank Umum Milik Negara periode 2013-2017 yaitu:



Gambar 1.1

Profitabilitas (ROA) Bank Umum Milik Negara Periode 2013-2017

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa tingkat profitabilitas Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang dihitung menggunakan ROA mengalami fluktuasi selama periode 2013-2017. Dari rata-rata ROA diatas dapat dikatakan bahwa Bank BUMN cenderung mengalami penurunan dari tahun 2013-2017. Namun, secara keseluruhan ROA bank BUMN pada kondisi yang sehat karena memiliki perolehan ROA diatas batas minimal yang ditentukan oleh BI yaitu sebesar 1,5%.

Data berikut merupakan perkembangan tingkat profitabilitas Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa periode 2013-2017 yang dilihat dari sudut ROA (*Return on Asset*):

Anisa Kusumadewi, 2019

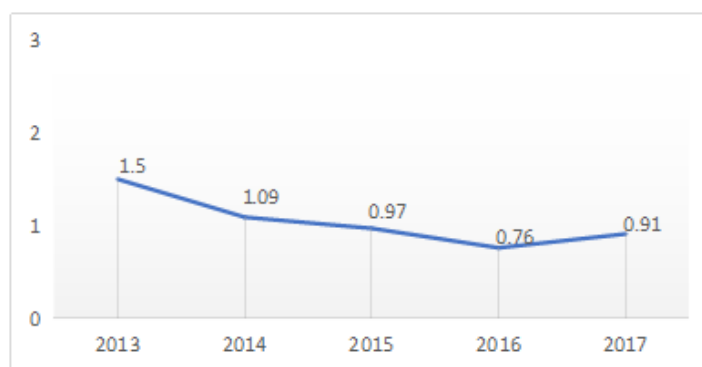
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.2
Data Profitabilitas (ROA) Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Periode 2013-2017

No	Nama Bank	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	BANK AGRIS	0.77	0.26	0.17	0.15	-0.2
2	BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL	1.39	0.79	0.33	0.35	0.31
3	BANK BUKOPIN	1.78	1.23	0.75	0.54	0.09
4	BANK CAPITAL	1.59	1.33	1.1	1	0.79
5	BANK DANAMON	2.5	1.4	1.7	2.5	3.1
6	BANK GANESHA	0.99	0.21	0.36	1.62	1.59
7	BANK MASPION	1.12	0.82	1.1	1.67	1.6
8	BANK MAYAPADA	2.53	1.98	2.1	2.03	1.3
9	BANK MEGA	1.14	1.16	1.97	2.36	2.24
10	BANK MESTIKA	5.42	3.86	3.53	2.3	3.19
11	BANK QNB	0.09	1.05	0.87	-3.34	-3.72
12	BANK SINARMAS	1.71	1.02	0.95	1.72	1.26
13	BANK WOORI SAUDARA	5.14	2.81	1.94	1.93	2.37
14	BANK CENTRAL ASIA	3.8	3.9	3.8	4	3.9
15	BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAG	1.66	1.47	1.55	1.49	1.45
16	BANK BUMI ARTA	2.05	1.52	1.33	1.52	1.73
17	CIMB NIAGA	2.76	1.44	0.24	1.2	1.7
18	BANK JTRUST	-7.58	-4.97	-5.37	-5.02	0.8
19	MAYBANK	1.74	0.68	1.01	1.6	1.48
20	MNC BANK	-0.93	-0.92	0.1	0.11	-7.47
21	OCBC NISP	1.81	1.79	1.68	1.85	1.96
22	PERMATA BANK	1.6	1.2	0.2	-4.9	0.6
	RATA-RATA	1.5	1.09	0.97	0.76	0.91

Sumber: Data diolah

Tabel 1.2 diatas dapat digambarkan dengan grafik mengenai perkembangan profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) periode 2013-2017 yaitu:



Gambar 1.2
Profitabilitas (ROA) Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Periode
2013-2017

Anisa Kusumadewi, 2019

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata nilai suatu rasio profitabilitas BUSN Devisa yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dapat dikatakan rata-rata tingkat profitabilitas BUSN Devisa tersebut cenderung mengalami penurunan yang signifikan dan di bawah standar ROA minimum bank yaitu sebesar 1,5%.

Meskipun secara umum kinerja finansial menunjukkan adanya peningkatan, namun dilihat dari sisi produktivitasnya kinerja Bank BUMN dan BUSN Devisa belum mengalami perbaikan hal ini antara lain terlihat dari *return on asset* (ROA) yang perkembangannya dari tahun ke tahun tidak meningkat secara konsisten bahkan cenderung mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, industri perbankan memang menghadapi persoalan yang tidak ringan karena maraknya praktik kecurangan (*fraud*) yang menggerogoti beberapa bank umum. Berdasarkan penyidikan OJK terdapat 108 kasus dalam kurun waktu 2014-2016. Diantaranya yaitu kasus kredit 55%, rekayasa pencatatan 21%, penggelapan dana 15%, transfer dana 5%, dan pengadaan asset 4% (liputan6.com diunduh tanggal 14 November 2016 diakses tanggal 12 November 2018).

Berikut kasus-kasus kecurangan yang terjadi pada industri perbankan beberapa tahun terakhir yang sangat merugikan, telah dirangkum dari beberapa media online, yaitu:

- 1) Bank Danamon, pada tahun 2014 telah terjadi kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh tiga pegawai Bank Danamon. Penggelapan dana yang mereka lakukan adalah dana pensiun Bank Indonesia senilai Rp 33 miliar.
- 2) Bank Mandiri, mengalami kasus pembobolan oleh salah satu debiturnya yaitu PT Tirta Amarta Botting Company pada 2015. Total kerugian Bank Mandiri akibat pembobolan tersebut sebesar Rp 1,83 triliun. Kejaksaan Agung sebelumnya juga telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu dari PT TAB maupun oknum karyawan dan pejabat Bank Mandiri yang diduga terlibat merekayasa data, yaitu, Manajer Komersial Perbankan, Surya Baruna Semenguk, Relationship Manager, Frans Eduard Zandra dan Senior Kredit Risk Manager, Teguh Kartika Wibowo.

- 3) Bank Muamalat, pada tahun 2016 telah terjadi kasus yang dilakukan oleh karyawan bank muamalat yang menjabat sebagai Accounting Manager Bank Muamalat Mataram yaitu Dini Yuliana. Dini Yuliana telah melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan dokumen atau kerja Bank Syariah. Ia juga dituding telah menghilangkan atau tidak memasukkan transaksi dalam pembukuan nasabah.
- 4) Bank Bukopin, merevisi laporan keuangan tahun 2016 karena adanya pencatatan tak wajar dari sisi pendapat bisnis kartu kredit. Laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatatkan sebesar Rp 183,53 triliun.
- 5) Bank BTN, pada tahun 2017 dana nasabah BTN sebanyak Rp 255 Miliar telah dibobol oleh oknum bank. Kasus pembobolan bank ini bermodus pemalsuan deposito.

Hasil studi yang dilakukan oleh lembaga dunia yaitu Booz-Allen & Hamilton McKinsey dalam Sutedi (2012, hlm. 48) merosotnya kinerja keuangan di Indonesia disebabkan karena masih lemahnya praktik *good corporate governance*. Penyebab lemahnya penerapan praktik *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia yaitu disebabkan oleh masih lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan yang belum maksimal, pasar modal yang masih *under-regulated*, lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas (Taufik & Christiawan, 2017).

Dilansir dalam media online Kompas.com di unduh tanggal 31 Juli 2018 dan di akses pada tanggal 17 Oktober 2018, praktik tata kelola yang baik atau disebut juga dengan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan dipandang telah menurun dalam 10 tahun terakhir. Dalam riset LPPI ketika pertama kali diterapkan pada 2006, nilai rata-rata GCG industri perbankan berada di kisaran 1 yang berarti sangat baik. Namun peringkatnya kembali menurun dan mencapai titik terendah pada tahun 2015.

Melihat dari kasus yang terjadi pada bank BUMN maupun bank swasta tersebut memunculkan pertanyaan apakah penerapan *good corporate governance* sudah diterapkan dengan baik di setiap perusahaan atau mungkin masih terdapat beberapa masalah dalam penerapannya seperti adanya konflik kepentingan yang terdapat dalam teori agensi. Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih mempekerjakan orang lain (*principal*) atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap agen tersebut (Aprianingsih, 2016). Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan tersebut terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan. Kondisi ini yang disebut dengan asimetri informasi. Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan perusahaan (Istighfarin & Wirawati, 2015).

Maka dari itu sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 suatu bank wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness*. Penerapan Tata Kelola yang baik salah satunya diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris serta kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank. Penerapan GCG akan tercapai apabila terdapat hubungan antara unsur yang terkait dengan perusahaan baik unsur internal maupun eksternal.

Menurut Gillan (2006) *Corporate Governance* dapat dibedakan menjadi dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat

Anisa Kusumadewi, 2019

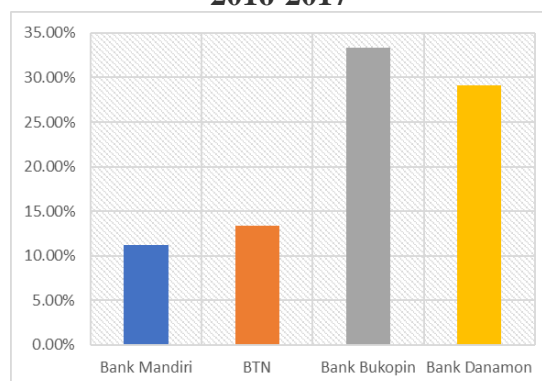
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, komite audit. Sedangkan eksternal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti dari pasar modal, pasar kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja, status negara keputusan pengadilan, pemegang saham dan praktek dari aktifitas investor. Dalam penelitian ini menggunakan mekanisme internal dan eksternal yaitu dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dan memastikan bahwa perusahaan sudah melaksanakan *good corporate governance* (Hasibuan & Sushanty, 2018). Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh dewan komisaris. Menurut Kusumastuti, Supatmi, & Sastra (2014) anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan dapat lebih mengenal cara bagaimana mencapai suatu kinerja keuangan yang baik. Berikut merupakan grafik anggota dewan komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi diambil dari beberapa sampel bank BUMN dan BUSN periode 2016-2017:

Gambar 1.3
Rata-Rata Persentase Latar Belakang Pendidikan Akuntansi yang
Dimiliki Anggota Dewan Komisaris Pada Bank BUMN dan BUSN Devisa
2016-2017



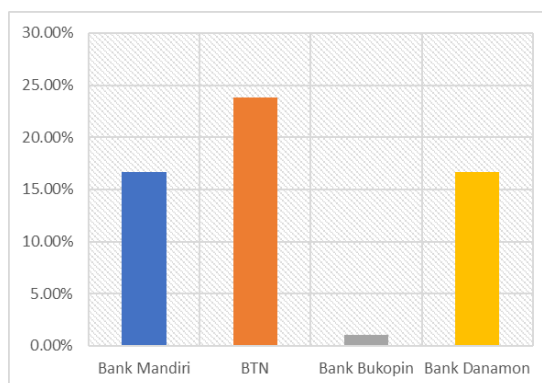
Sumber: *data diolah*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase anggota dewan komisaris yang mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi terbesar yaitu Bank Bukopin sebesar 33%, posisi kedua adalah Bank Danamon sebesar 29,7%, posisi ketiga Bank Tabungan Negara sebesar 13,4%, dan yang terakhir adalah Bank Mandiri sebesar 11,3%. Namun, jika dilihat pada tabel 1.2 ROA Bank Bukopin mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan pada tahun 2016 terdapat kasus pencatatan tak wajar pada laporan keuangannya. Maka dapat dikatakan bahwa dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi belum tentu dapat meningkatkan kinerja dan menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Syafiqurrahman, Andiarsyah, & Suciningsih (2014) bahwa latar belakang pendidikan akuntansi pada dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dan bertolak belakang dengan penelitian Fransisca (2013) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan latar belakang dewan komisaris di bidang akuntansi/keuangan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Organ perusahaan selanjutnya yaitu komite audit. Komite audit mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan (Sam'aini, 2008). Dalam penelitian ini penulis menggunakan proksi latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite audit. Berdasarkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pasal 38 menyatakan bahwa struktur keanggotaan komite audit paling kurang terdiri dari seorang komisaris independen, seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi/keuangan dan hukum/perbankan. Menurut Syafiqurrahman et al., (2014) ketika semakin banyak anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dan akuntansi maka akan semakin efektif dalam mengurangi terjadinya kecurangan pada perusahaan karena komite audit akan mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang akan menggambarkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, yang artinya informasi yang dilaporkan secara baik serta diawasi dengan akan menunjukkan kondisi kinerja perusahaan yang baik juga.

Berikut merupakan grafik rata-rata ukuran komite audit pada bank BUMN dan beberapa bank BUSN periode 2016-2017:

Gambar 1.4
Rata-Rata Persentase Latar Belakang Pendidikan Akuntansi/Hukum yang Dimiliki Anggota Komite Audit Pada Bank BUMN dan BUSN Devisa 2016-2017



Sumber: *data diolah*

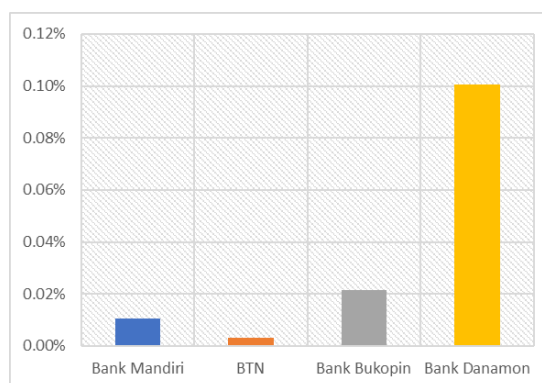
Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase latar belakang pendidikan akuntansi/hukum yang dimiliki komite audit terbesar dimiliki oleh Bank Tabungan Negara sebesar 23,8%, posisi kedua yaitu Bank Mandiri dan Bank Danamon sebesar 16,67%, dan posisi terakhir yaitu Bank Bukopin sebesar 0%. Meskipun Bank Tabungan Negara memiliki persentase terbesar, namun ROA bank tersebut menurun dan terdapat kasus pada bank tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lienardi & Widyastuti (2015) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian Hasibuan & Sushanty (2018) yang menyatakan latar belakang pendidikan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Manajer dalam perusahaan juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham, sehingga seringkali menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa struktur kepemilikan yaitu kepemilikan

manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua bentuk *corporate governance* yang digunakan untuk membantu masalah keagenan.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer dan manajer tersebut berperan juga sebagai pemegang saham, (Hadi, Fadrul, & Luvita, 2018). Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan persentase kepemilikan manajer, komisaris, dan direksi terhadap total saham yang beredar (Pujiati, 2015). Berikut merupakan grafik rata-rata kepemilikan manajerial pada bank BUMN dan BUSN periode 2016-2017:

Gambar 1.5
Grafik Rata-Rata Kepemilikan Manajerial pada Bank BUMN dan BUSN Devisa Periode 2016-2017



Sumber: *data diolah*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase kepemilikan manajerial terbesar yaitu pada Bank Danamon sebesar 0,10%, posisi kedua yaitu Bank Bukopin sebesar 0,02%, posisi ketiga yaitu Bank Mandiri sebesar 0,01%, dan posisi terakhir yaitu Bank Tabungan Negara sebesar 0,003%. Dari grafik tersebut persentase tertinggi kepemilikan saham oleh manajer adalah Bank Danamon dan didukung dengan ROA Bank Danamon yang mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan 2017. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari & Juliarto (2017) kepemilikan manajerial meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer termotivasi untuk menggandakan upayanya sebagai bagian dari pemegang saham untuk mewujudkan kekayaan perusahaan. Bertentangan dengan penelitian Sejati et al., (2018) yang menyatakan bahwa

Anisa Kusumadewi, 2019

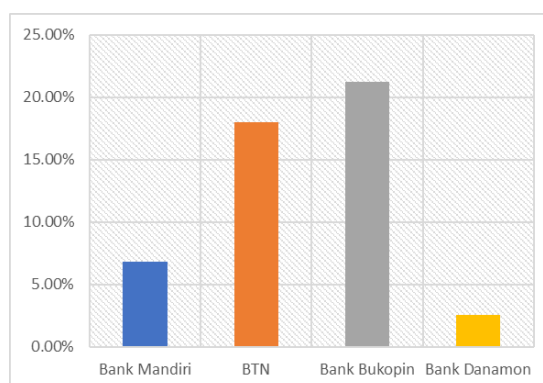
PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, ternyata masih terdapat kasus penggelapan dana yang menimpa Bank Danamon, meskipun bank tersebut memiliki persentase kepemilikan terbesar. Hal ini sejalan dengan penelitian Warouw, Tommy, & Arie (2018) bahwa dengan tingkat kepemilikan saham manajer yang terlalu tinggi juga tidak baik, karena manajer memiliki hak voting yang besar untuk melakukan kontrol perusahaan.

Struktur kepemilikan yang kedua yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap dapat memonitor kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi juga akan menghasilkan upaya-upaya pengawasan yang lebih intens sehingga dapat membatasi perilaku *opportunistic* oleh manajer, yaitu manajer melaporkan laba secara oportunistis untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya (Jensen dan Meckling, 1976). Berikut merupakan grafik rata-rata kepemilikan institusional pada Bank BUMN dan BUSN Devisa periode 2016-2017:

Gambar 1.6
Grafik Rata-rata Kepemilikan Institusional pada Bank BUMN dan BUSN Devisa Periode 2016-2017



Sumber: *data diolah*

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional terbesar yaitu pada Bank Bukopin sebesar 21%, posisi kedua yaitu Bank Tabungan Negara sebesar 17%, posisi ketiga yaitu Bank Mandiri sebesar 6%, dan posisi terakhir pada Bank Danamon sebesar 2,5%. Kepemilikan

Anisa Kusumadewi, 2019

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi di antara pemegang saham dengan manajer.

Menurut Aprianingsih (2016) dengan terlaksananya fungsi pengawasan oleh pihak institusional melalui kepemilikan sahamnya, maka kinerja manajemen akan semakin terawasi dan dapat meminimalisasi tindak kecurangan yang dapat dilakukan oleh manajemen sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Namun, tingginya persentase kepemilikan institusional pada Bank Bukopin bertolak belakang dengan tabel 1.2 yaitu menurunnya ROA Bank Bukopin dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan terdapat kasus pencatatan tak wajar pada laba laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian oleh Suprpti & Segoro (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Selain *Corporate Governance* yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yaitu kualitas audit yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan harus diperiksa oleh auditor yang independen dan berkualitas. Auditor dituntut untuk bekerja secara profesional dan melandaskan pekerjaan mereka pada standar atau peraturan yang berlaku dan juga kode etik akuntan publik. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan digunakan oleh para *stakeholders* dalam mengambil keputusan, baik keputusan ekonomi, politik, dan sosial. Maka dari itu perusahaan perlu menggunakan jasa auditor yang memberikan kualitas audit yang memadai dalam pemeriksaan laporan keuangan (Darwin, 2012).

Laporan keuangan yang diaudit oleh audit yang berkualitas akan membantu mengurangi asimetri informasi dan melindungi para pemangku kepentingan dengan memberikan jaminan yang wajar bahwa laporan keuangan manajemen bebas dari salah saji material (Hassan & Farouk, 2014). Hasil audit dari auditor eksternal yang handal akan digunakan oleh investor untuk dijadikan dasar keputusan alokasi sumber daya perusahaan. Ketika investor memiliki keyakinan dan kepercayaan dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal, maka mereka tertarik untuk memberikan dana lebih pada perusahaan itu

yang pada akhirnya akan menghasilkan peningkatan pada kinerja keuangan (Mulyadi, 2013).

KAP yang memiliki spesialisasi pada industri tertentu pasti akan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai kondisi lingkungan industri tersebut. Secara relatif mereka akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan kualitas laba. Di sisi lain, jika KAP tidak memiliki kemampuan dalam industri klien, mereka mungkin akan memiliki sedikit pengetahuan tentang industri kliennya, sehingga dapat memberikan kualitas audit yang lebih rendah (Heryan & Adiwijaya, 2013).

Kasus skandal akuntansi dalam beberapa tahun lalu yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) sedikit melunturkan keindependensian akuntan publik di mata publik yang menyebabkan turunnya kinerja perusahaan kliennya. Kasus terakhir yang dialami oleh SNP *Finance* pada tahun 2018 yang telah melakukan pembobolan kredit 14 bank dengan nilai kerugian Rp 14 triliun. Padahal laporan keuangan perusahaan tersebut telah diaudit oleh salah satu KAP yang berafiliasi dengan KAP *International Deloitte*. Namun menurut OJK KAP tersebut telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan telah menimbulkan kerugian terhadap industri jasa keuangan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan (Hukumonline.com diunduh 15 November 2018, diakses 1 Januari 2018).

Dengan adanya kasus tersebut dapat terlihat kinerja perusahaan SNP *finance* mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kurangnya penerapan *good corporate governance* dan kualitas audit dari KAP yang tidak memenuhi standar audit yang berlaku umum. Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (Meidona, 2018).

Dalam penelitian ini penulis memilih industri perbankan yaitu bank BUMN dan BUSN Devisa. Alasan penulis memilih perbankan dalam penelitian ini karena

perbankan memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Selain itu, dari sisi ROA pun Bank BUMN dan BUSN selama tahun 2013 sampai dengan 2017 cenderung mengalami penurunan dan di dukung oleh lemahnya penerapan GCG pada industri perbankan. Sedangkan, periode penelitian yang digunakan yaitu 2013 hingga 2017 karena pada tahun tersebut menurut Ketua Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan OJK telah mengungkapkan 108 kasus dugaan tindakan pidana perbankan yang menyebabkan kinerja dan GCG dalam industri perbankan mengalami penurunan.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dan komite audit. Alasan peneliti menggunakan mekanisme dari *Corporate Governance* sebagai variabel independen karena dapat menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. Selain itu, penerapan mekanisme yang efektif dan konsisten diyakini dapat mengurangi *agency cost*. Variabel independen yang kedua yaitu kualitas audit yang diukur berdasarkan spesialisasi industri KAP. Jika auditor memiliki kemampuan dalam industri klien, secara relatif mereka akan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan masih banyaknya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan masih terdapat fakta yang tidak sesuai dengan teori. Seperti halnya yang terjadi pada Bank Bukopin, meskipun memiliki rata-rata persentase yang tinggi pada dewan komisaris dan kepemilikan institusional, namun berbanding terbalik dengan ROA yang semakin menurun. Yang kedua, persentase kepemilikan manajerial dan komite audit yang tinggi pada Bank Danamon pun berbanding terbalik dengan masih adanya kasus penggelapan dana oleh oknum bank tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas maka perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui konsistensi hasil jika diterapkan pada sampel yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat judul atas penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Anisa Kusumadewi, 2019

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada Bank BUMN dan BUSN Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017?
5. Bagaimana pengaruh Kualitas Audit terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017?

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta

Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kualitas Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank BUMN dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan sebagai masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya dalam bahasan mengenai *corporate governance*, kualitas audit, dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi atau dasar kajian untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini menambah wawasan yang dapat bermanfaat, yaitu:

- a. Bagi emiten, memberikan informasi bagaimana *corporate governance* mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, serta kualitas audit yang diukur berdasarkan spesialisasi industri KAP dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, sehingga penelitian ini mampu menjadi referensi

pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait penerapan *good corporate governance* dan pemilihan KAP.

- b. Bagi investor, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.